

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota batik dengan julukan “keindahan Asia yang tiada akhir” pernah menjadi destinasi dunia yang harus dikunjungi menurut New York Times yang dirilis pada tahun 2014 (Beritasatu, 2014). Keberadaan kota Yogyakarta tidak lepas dari berdirinya Keraton Kasultanan Yogyakarta pada tanggal 13 Februari 1755. Peristiwa itu bertepatan dengan terlaksananya Perjanjian Giyanti yang menandai terbaginya Kerajaan Mataram Islam menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Di sini awal mulanya asal usul kota Yogyakarta. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, meskipun Kasultanan Yogyakarta secara *de jure* (wilayah) telah ada sejak tahun 1755, namun keberadaan kota Yogyakarta sebagai ibukota Kasultanan Yogyakarta diakui tanggal 7 Oktober 1756. Hal ini merupakan pertanda mulai ditempatinya Keraton Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan Sultan Hamengku Buwana I. Sejak saat itulah, kehidupan sebuah kota Yogyakarta mulai bertumbuh (Kidnesia, 2015). Terlepas dari hal tersebut Pangeran Mangkubumi membangun Keraton Yogyakarta dan menciptakan Yogyakarta sebagai salah satu negara Jawa yang paling kuat yang pernah ada. Kota Yogyakarta merupakan kota yang memiliki status sebagai “Daerah Istimewa” hal tersebut dikarenakan kota Yogyakarta satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan sistem pemerintahan kerajaan. Sultan Yogyakarta akan otomatis menjadi gubernur tanpa dipilih oleh masyarakat Yogyakarta tanpa adanya Pilkada (Beritasatu, 2014).

Keraton Yogyakarta mempengaruhi kebudayaan yang diterapkan di kota Yogyakarta. Fungsi Keraton sampai sekarang masih dipercaya oleh sebagian besar masyarakat sebagai pelindung spiritual dan menjadi panutan dalam kehidupan

bermasyarakat. Peranan Keraton Yogyakarta selain sebagai peninggalan bersejarah yang sangat penting, Keraton juga masih digunakan untuk kepentingan-kepentingan umum dan pemerintahan. Untuk kepentingan pemerintahan misalnya digunakan untuk tempat tinggal raja atau sultan. Untuk kepentingan umum misalnya masyarakat ataupun pelajar diperbolehkan melakukan penelitian di Keraton Yogyakarta untuk memperoleh pengetahuan tentang Keraton Yogyakarta, isi dan sejarah Keraton (Imadikus, 2012). Keraton Yogyakarta juga menjadi pusat budaya islam yang masih tumbuh sampai saat ini hal tersebut dikarenakan Keraton merupakan kerajaan berbasis Islam. Keraton Yogyakarta merupakan satu-satunya kerajaan Islam sebagai *center of culture* dengan keislaman yang fundamental khususnya kyai pecinta islam secara kultural sehingga banyak yang merawat dan melindunginya (Liputan6, 2015).

Setelah kemerdekaan, sudah dua sultan yang menjadi gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sampai akhirnya terjadi konflik internal antara Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan para adik laki-lakinya tepatnya pada tanggal 30 April dan 5 Mei 2015 ketika Sri Sultan Hamengkubuwono X membacakan Sabda Raja di Siti Hinggil Keraton Yogyakarta (Merdeka, 2015). Munculnya konflik internal Keraton Yogyakarta tersebut dikarenakan ketika Sri Sultan Hamengkubuwono X mengeluarkan sabda yang berisi 5 poin pada 30 April 2015. Sabda tersebut memiliki poin-poin yang pertama yaitu mengenai penggantian nama Sri Sultan Hamengkubuwono menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono, kedua yaitu gelar sultan tentang *khalifatullah* dihapuskan, ketiga yaitu penyebut kaping sedasa diganti kaping sepuluh, keempat yaitu mengubah perjanjian antara pendiri ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan dan yang terakhir yaitu mengenai menyempurnakan keris Kanjeng Kyai Kopek dengan Kanjeng Kyai Ajeng Piturun.

Peliknya konflik internal yang terjadi di Keraton Yogyakarta semakin diperkuat dengan adanya sabda kedua yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X mengenai perubahan nama anak pertamanya Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Perubahan nama putri sulungnya ini juga diikuti dengan diangkatnya menjadi putri mahkota. Sultan sendiri mengakui secara implisit, bahwa perubahan nama dan strata kesultanan GKR Pembayun merupakan indikasi kuat putrinya itu bakal menjadi penerus takhtanya (Merdeka, 2015). Sabda Raja kedua itulah yang akhirnya membuat keluarga besar keraton Yogyakarta pecah. Banyak adik-adik Sultan tak terima Pembayun jadi Putri Mahkota yang bakal memimpin Yogyakarta. Sikap kekecewaan sangat terlihat dari wajah Sri Sultan Hamengkubuwono X. Penguasa Ngayogyakarta Hadiningrat ini kecewa dengan sikap adik-adiknya yang berkomentar terkait Sabda Raja yang dikeluarkannya (Liputan6, 2015).

Adanya penggantian nama putri pertamanya Gusti Kanjeng Ratu Pembayun menjadi Mangkubumi Hamemayu Hayuning Buwono dituding menjadi langkah sultan mempersiapkannya sebagai putri mahkota kesultanan Yogyakarta. Polemik internal Keraton Yogyakarta terjadi dalam hal ekonomi dan politik. Dari segi politik dapat dilihat banyak yang tertarik mengenai jabatan raja dan juga posisi sultan yang terbilang menggiurkan untuk kepentingan politik dalam hal menguasai Keraton Yogyakarta. Sedangkan dari segi ekonomi yaitu banyaknya aset yang dimiliki Keraton Yogyakarta.

Adanya penghapusan *khalifatullah* tentunya sangat ditentang oleh kerabat-kerabat Keraton dimana sejak dahulu Keraton sudah memiliki Sabda yaitu Sultan sebagai *khalifatullah* yang artinya yaitu Sultan pemimpin agama yang sesuai dengan prinsip islam dimana laki-laki dipilih untuk menjadi pemimpin. Maka dari itu Sultan seharusnya dari kalangan laki-laki karena memang sudah diatur dalam islam yang menjadi dasar keraton Yogyakarta. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yang

dikutip dari adik Sri Sultan Hamengkubuwono X yaitu Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhoningrat yang menyatakan bahwa tidak ada dalam sejarah kesultanan pengangkatan putri mahkota sebagai pewaris takhta, hal tersebut sangat berlawanan dengan tatanan Keraton. Selain itu, sabda yang menyatakan bahwa akan menyempurnakan keris Kanjeng Kyai Kopek dengan Kanjeng Kyai Ajeng Piturun. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono X menganggap bahwa keris yang digunakan Sri Sultan Hamengkubuwono I-IX tidaklah sempurna (Tempo, 2015).

Penentangan kerabat Keraton Yogyakarta terhadap sabda dan *dhawuh* raja oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X semakin pelik. Hal tersebut ditunjukkan oleh Raden Mas Triheru yang merupakan cucu Sultan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dalam pertemuan Trah Keraton yang menyatakan bahwa sabda yang dikeluarkan oleh Sultan merupakan bentuk kudeta yang dilakukan oleh sultan sendiri. Menurut Triheru, alasan bila nantinya yang naik takhta adalah Gusti Kanjeng Ratu Pembayun yang telah berganti nama menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi maka Dinasti Hamengkubuwono Hancur. Ketika Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi bertakhta maka Dinasti Hamengkubuwono yang merupakan hasil dari perjanjian Ki Ageng Pamanahan dan Ki Ageng Giring akan berganti menjadi Dinasti Wironegoro yang diambil dari nama suami Mangkubumi yaitu Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro. Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan adanya pengkudetaan dan Keratonnya pun diambil (Liputan6, 2015).

Konflik internal yang terjadi di Keraton Yogyakarta menyebabkan banyaknya kerabat Keraton Yogyakarta yang terlibat untuk menentang Sabda raja dan *dhawuh* yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X tersebut. Diantara kerabat-kerabat tersebut diantaranya yaitu lima belas putra dan putri Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang mengeluarkan pernyataan sikap melalui surat terbuka untuk Sri Sultan Hamengkubuwono X. Surat tersebut berkaitan mengenai lembaga

adat dan warisan budaya adalah Keraton Yogyakarta, sehingga Sultan bukanlah pemilik Keraton tetapi hanya sebagai pemimpin adat yang akan menetapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan Keraton. Keraton sebagai Institusi adat dan Keraton Yogyakarta secara historis kultural adalah warisan budaya Kasultanan Trah Hamengkubuwono, sehingga segala sesuatu yang menyangkut suksesi keluarga Hamengkubuwono harus sesuai *paugeran* atau peraturan Keraton yang sudah berlangsung turun temurun yang telah banyak dicontohkan oleh para leluhur (Beritasatu, 2015).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Karsono Kardjono Saputra selaku pengamat kebudayaan Universitas Indonesia. Dalam menganggapi polemik internal yang terjadi di Keraton Yogyakarta menurut Karsono Kardjono, tak ada suksesi takhta kerajaan yang terjadi tanpa konflik dalam sejarah Asia Timur dan Tenggara termasuk Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya polemik internal yang terjadi mengenai suksesi takhta Sri Sultan Hamengkubuwono X, dimana peluang adik kandung Sultan menjadi pewaris takhta kerajaan Mataram Islam yang telah berdiri sejak abad ke-17 itu pun telah hilang karena adanya sabda yang dikeluarkan oleh Sultan yang isinya akan mengangkat anak sulungnya sebagai putri mahkota.

Peliknya konflik internal Keraton Yogyakarta yang seolah menyudutkan Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan sabda raja dan *dhawuh* yang dikeluarkannya membuat banyak media bertanya-tanya mengenai konflik yang terjadi di Keraton Yogyakarta dan isi dari sabda raja serta *dhawuh* tersebut. Namun, sabda yang beredar di media massa tidak sesuai dengan sabda raja yang dikeluarkan pada 30 April 2015. Pada dasarnya bias berita terjadi karena media massa tidak berada di ruang vakum (Sobur, 2012:29). Menurut Athuser, dalam (Sobur, 2012:29) media sesungguhnya berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik, fakta yang kompleks dan beragam. Menurut Sobur, (2012:30)

media massa bukan sesuatu yang bebas dan independen tetapi ada keterkaitan dengan realitas sosial pada berbagai kepentingan yang bermain dalam media massa, media massa akan bergerak dinamis diantara pusaran-pusaran kepentingan yang sedang bermain. Kenyataan tersebutlah yang menyebabkan bias berita di media massa adalah sesuatu yang sulit dihindari. Media massa memiliki peran yang penting dalam menyampaikan berita, penilaian atau gambaran umum tentang banyak hal yang dapat membentuk opini publik dan menggambarkan citra yang ia representasikan untuk diletakkan dalam kehidupan yang lebih empiris.

Media massa termasuk media penyiaran yaitu televisi dapat merubah kerangka berfikir bagi masyarakat. Televisi masih menjadi media utama yang dikonsumsi masyarakat Indonesia yaitu sebesar 95%, disusul oleh internet 33%, radio 20%, surat kabar 12%, tabloid 6%, dan majalah 5% (Nielsen, 2014). Hal tersebut menunjukkan bahwa televisi memiliki *audience* terbesar sehingga memiliki peran yang penting dalam menciptakan persepsi tentang peran yang dimainkan oleh televisi mengenai pengembangan kehidupan sosial-ekonomi dan politik masyarakat. Kemajuan televisi tidak terlepas dari konten yang ada di dalamnya agar tidak kerap dalam memilih informasi untuk dipublikasikan atau disiarkan dalam pengolahan informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi pada media massa, media elektronik pun mulai berkembang. Hal tersebut diperkuat oleh survey yang dilakukan oleh NIELSEN pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa televisi terus mengalami peningkatan.

Salah satu televisi yang memiliki slogan sebagai “televisi masa kini” dan memiliki sapaan untuk para penontonnya sebagai *good people* yang memiliki arti bahwa penonton yang menyaksikan program yang disediakan NET TV merupakan masyarakat yang dapat memilah informasi yang dapat dipercaya secara objektif sehingga dapat membangun opini yang positif terhadap suatu hal sesuai dengan realitas yang sedang terjadi. Visi dari NET TV itu sendiri yaitu menyajikan konten

program yang informatif, kreatif, inspiratif dan menghibur. Adanya visi dalam menciptakan program yang informatif NET TV berusaha menghadirkan salah satu acara “Satu Indonesia”, program tersebut dimaksudkan untuk dapat mengungkapkan suatu kebenaran dalam sebuah konflik yang sedang terjadi di kehidupan masyarakat. Salah satu konflik yang sempat diungkapkan kebenarannya yaitu mengenai konflik Keraton Yogyakarta pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono X. Konflik internal yang terjadi di Keraton Yogyakarta yang ditayangkan dalam *talkshow* “Satu Indonesia” di NET TV menarik untuk dianalisis. Hal ini dikarenakan pemberitaan Konflik internal di Keraton Yogyakarta dikupas melalui pihak yang diduga selama ini menjadi penyebab asal mulanya konflik tersebut yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X.

*Talkshow* “Satu Indonesia” ini menggambarkan mengenai suatu konflik yang sedang terjadi di masyarakat, seperti salah satunya yaitu konflik internal Keraton Yogyakarta. Sebagai salah satu konflik internal yang cukup disayangkan oleh masyarakat sekitar khususnya masyarakat Yogyakarta membuat masyarakat rindu akan kedamaian yang digambarkan di Keraton Yogyakarta sejak masa lalu. Masyarakat sempat bingung dengan adanya pemberitaan yang berbeda-beda pada setiap media massa sehingga ingin mengetahui kebenaran konflik internal yang sebenarnya terjadi di Keraton Yogyakarta. Ada aspek yang unik dalam *talkshow* “Satu Indonesia” pada episode Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengenai kebudayaan yang sangat kental yang diterapkan di Keraton Yogyakarta dan adanya prinsip *khalifatullah* yang diterapkan di Keraton Yogyakarta. Adanya perbedaan perspektif antar media massa menciptakan opini publik yang berbeda-beda mengenai konflik internal Keraton Yogyakarta yang sedang terjadi juga membuat sebagian masyarakat memiliki opini yang buruk terhadap Sri Sultan Hamengkubuwono X tersebut.

Sebagian besar media massa memberitakan mengenai Sabda yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X menjadi penyebab retaknya Keraton Yogyakarta. Pada *talkshow* “Satu Indonesia” ini menggambarkan mengenai kuatnya tokoh Sultan sebagai panutan dalam kehidupan di Keraton Yogyakarta dan kentalnya kebudayaan yang diajarkan oleh Keraton di Yogyakarta untuk tetap melestarikan budaya warisan para leluhur. Adanya konflik internal yang terjadi di Keraton Yogyakarta menggambarkan bahwa Yogyakarta masih menganut sistem patriarki karena sesuai dengan prinsip Islam dimana laki-laki menjadi pemimpin dan belum bisa menerima emansipasi wanita sebagai suatu kekuatan dalam berproses.

Hal ini menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk diteliti secara semiotika menggunakan analisis semiotika John Fiske untuk melihat makna bergantung pada gambaran atau pikiran orang dalam hubungannya dengan isyarat dan objek yang di isyaratkan. Makna seperti apa yang terkandung di dalamnya, bagaimana makna itu diciptakan melalui suatu simbol dan lain sebagainya yang tentunya digambarkan dalam ruang lingkup sistem kerajaan di Keraton Yogyakarta mengenai Kesultanan dengan prinsip *khalifatullah*. **Maka dari itu dilakukan penelitian mengenai “REPRESENTASI FEMINISME DALAM TALKSHOW “SATU INDONESIA” NET TV EPISODE SRI SULTAN HAMENKUBUWONO X”**

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Bagaimana feminisme direpresentasikan dalam *Talkshow* “Satu Indonesia” NET TV Episode Sri Sultan Hamengkubuwono X ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai:

Untuk mengetahui representasi feminisme dalam *Talkshow* “Satu Indonesia” NET TV Episode Sri Sultan Hamengkubuwono X.

## **1.4 Penelitian Terdahulu**

### **1.4.1 Aspek Teoritis**

Secara Teoritis hasil dari penelitian ini dilakukan sebagai pengembangan Ilmu Komunikasi khususnya dalam bidang *broadcasting* dan dapat memberikan saran bagi peneliti dalam mengembangkan kajian Ilmu Komunikasi yang berkaitan dengan program *talkshow* pada media televisi dengan menggunakan metode analisis semiotika dan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta opini publik mengenai Keraton Yogyakarta.

### **1.4.2 Aspek Praktis**

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi dunia televisi khususnya dalam program *talkshow* untuk menyampaikan pesan kepada penonton dan membangun opini publik yang positif yang sesuai dengan realitas yang sedang terjadi. Diharapkan juga dari hasil penelitian ini dapat memberikan contoh kepada masyarakat mengenai pemerintahan yang bersih seperti yang diterapkan di Keraton Yogyakarta tanpa melupakan budaya para leluhur dan tetap melestarikan budaya yang menjadi warisan para leluhur.

## **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini adalah mengenai analisis semiotika yang diterapkan dalam pemilihan Sultan sebagai pemimpin di Keraton Yogyakarta pada masa Kesultanan Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam *talkshow* “Satu Indonesia” episode Sri Sultan Hamengkubuwono X.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB I ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pernyataan penelitian, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB II berisi mengenai penelitian sebelumnya, landasan teori yang digunakan sebagai dasar dari analisis penelitian, ruang lingkup penelitian, serta kerangka pemikiran.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada BAB III berisi mengenai objek penelitian, metode penelitian, jenis, dan teknik pengumpulan data.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB IV berisi pembahasan dari penelitian yang berupa analisa pengolahan data yang telah dilakukan dikaitkan dengan teori yang mendasarinya.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada BAB V berisi rangkuman seluruh penelitian skripsi ini yang didapatkan dari pembahasan dan kemungkinan saran perbaikan ataupun pendapat yang dikemukakan terkait dengan hasil pengolahan data yang dikaitkan dengan teori-teori yang mendasarinya.